

# REDD+ dan Tata Kelola Pemerintahan

Lokakarya Pengembangan  
Kapasitas REDD+  
Bogor, Indonesia  
19 Maret 2010

Crystal Davis  
World Resources Institute

## Topik Presentasi

1. Mengapa tata kelola kehutanan penting untuk penerapan REDD?
2. Tata kelola kehutanan di dalam mekanisme REDD tingkat global
3. Memperkenalkan "fungsi" dari Governance of Forests Initiative (GFI)
4. Komentar dari peneliti

# Prasyarat untuk keberhasilan REDD+

## 1. Menjawab penyebab deforestasi

### Penyebab Signifikan:

Pertanian, infrastruktur, logging.

### Penyebab yang mendasari deforestasi:

Permintaan yang tinggi dari produk pertanian dan kehutanan, kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, Korupsi, kebijakan dan peraturan yang mendorong deforestasi, dll

# Prasyarat untuk keberhasilan REDD+

## 2. Pengurangan Deforestasi permanen (Jangka Panjang)

- ✓ Perencanaan tata guna lahan yang rasional / tepat
- ✓ Penyelesaian permasalahan tenurial bagi masyarakat dalam hutan
- ✓ Penegakan hukum yang optimal
- ✓ Kapasitas yang mencukupi untuk melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
- ✓ Pengentasan kemiskinan dan mencari alternatif mata pencaharian

## Prasyarat untuk keberhasilan REDD+

### 3. Keadilan / Kesetaraan

- ✓ Partisipasi seluruh pemangku kepentingan
- ✓ Pembagian manfaat yang merata dan adil
- ✓ Pengakuan dan penerapan hak-hak dasar dari komunitas
- ✓ Akses kepada keadilan
- ✓ Mekanisme akuntabilitas

## Apa kesamaan dari 3 prasyarat tersebut?

### Tata Kelola Kehutanan!

Tata kelola kehutanan merupakan penyebab mendasar dari deforestasi.

Tata kelola kehutanan yang baik dan kuat diperlukan untuk menjaga agar tujuan REDD adalah jangka panjang dan berkeadilan.

REDD tidak akan berhasil tanpa perbaikan dari tata kelola kehutanan

## Tata kelola kehutanan di dalam UNFCCC

### Penyusunan *safeguards* untuk REDD

"tata kelola kehutanan yang transparan dan efektif"

"Mengakui dan melindungi pengetahuan lokal serta hak-hak dasar masyarakat adat / komunitas lokal"

"Partisipasi secara penuh dan efektif (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) dari semua pemangku kepentingan"

## Tata kelola kehutanan dalam FCPF & UN-REDD

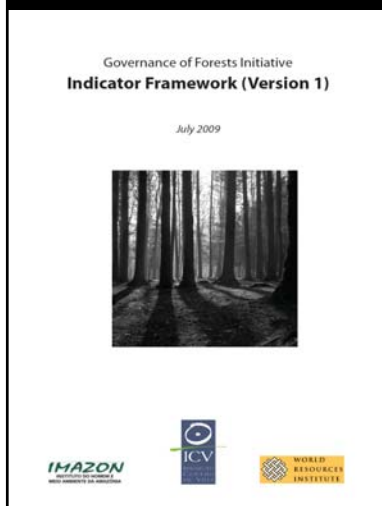
Mendukung negara-negara untuk "siap" melaksanakan REDD, melalui:

- Menilai penyebab deforestasi dari aspek tata kelola kehutanan
- Fasilitasi proses konsultasi para pemangku kepentingan
- Mengembangkan strategi untuk memperbaiki tata kelola
- Mengembangkan sistem revenue yang transparan
- Mengembangkan sistem pengawasan untuk dampak sosial dan lingkungan

## Tantangan: meningkatkan tata kelola kehutanan untuk penerapan REDD?

- Bagaimana menentukan suatu tata kelola yang baik?
- Bagaimana identifikasi prioritas perbaikan dalam konteks REDD?
- Bagaimana untuk mengukur dan mengawasi peningkatan dari tata kelola kehutanan dari waktu ke waktu?

## The Governance of Forests Initiative



- Indikator global untuk mengukur tata kelola kehutanan
- Disesuaikan dengan konteks dan karakteristik lokal serta dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat lokal
- Digunakan bagi masyarakat sipil untuk identifikasi kekuatan tata kelola kehutanan di satu negara, tanpa membandingkannya

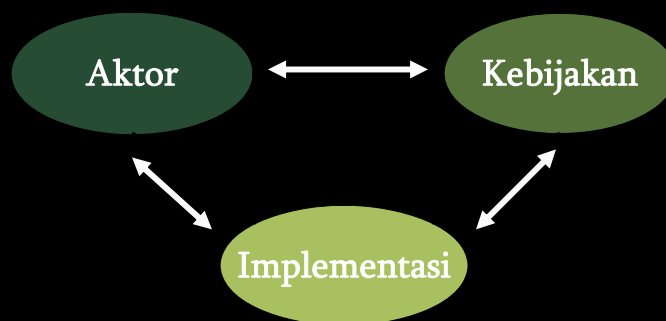
## The GFI Toolkit

kerangka indikator untuk mengukur  
tata kelola kehutanan

“**FRAMEWORK**” = kerangka konseptual  
yang mencakup prinsip kunci, komponen  
dan isu yang mendefinisikan tata kelola  
kehutanan yang baik

“**INDICATORS**” = terdiri dari 94  
pertanyaan kunci mengenai bagaimana  
peraturan dan kebijakan dibuat,  
digunakan dan dirubah

## Komponen tata kelola



## Prinsip tata kelola yang baik

Transparansi

Partisipasi

Akuntabilitas

Kordinasi

Kapasitas

## Isu sektor kehutanan

Tenurial

Pengelolaan  
Kehutanan

Tata Guna  
Lahan /  
Hutan

Revenues &  
insentif

# The GFI Framework

		GOVERNANCE COMPONENTS		
		Actors	Rules	Practice
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE	Transparency			
	Participation		land tenure land use planning	
	Accountability		forest management revenue distribution and economic incentives	
	Coordination			
	Capacity			
<b>Country Profile Indicators</b> <i>(key facts and quantitative information relating to forest sector outcomes and outputs)</i>				

Revenues Incentives		GOVERNANCE COMPONENTS		
		Actors	Rules	Practice
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE	Transparency	<u>Government</u> Forest expertise of the national budget authority	<u>Legal/Policy Framework for Forest Fiscal Management</u> Roles and Responsibilities for fiscal management	<u>Forest Fiscal Management</u> Effective accounting system for public spending Comprehensive and timely reporting on fiscal activity
	Participation	<u>Civil society</u> Capacity to work on forest revenue issues	Forest revenue sharing mechanisms Legal requirements for fiscal transparency	<b>Transparent management of resource funds</b>
	Accountability	<u>Private Sector</u> Financial transparency of forest resource companies Environmental policies of lending institutions	<u>Forest Charge System</u> Effectiveness of the forest charge system Quality of processes to set forest charges	Internal controls and auditing of fiscal activity External auditing of fiscal activity
	Coordination		<u>Economic Incentives</u> Effectiveness of economic incentives in the forest sector Quality of processes to set economic incentives in the forest sector Consideration of the environmental impacts of non-forest sector economic incentives	<u>Forest Charge System</u> Effective administration of forest charges Public awareness of forest charges Accounting system for revenue collection
	Capacity		<u>Forest Agency Budget Process</u> Transparency of the annual budget process Quality of legislative oversight	<u>Economic Incentives</u> Effective implementation of incentive programs Accounting system for incentive payments



## **Contoh Indikator: Pengelolaan sumber dana yang transparan**

### **Elemen dari kualitas**

- Kejelasan dari siapa yang mengelola dana
- Penentuan pemangku kepentingan yang luas
- Peraturan yang dapat menjelaskan secara jelas tata cara penggunaan dana.
- Informasi fiskal yang secara rutin dipresentasikan kepada parlemen dan publik secara luas. yang bisa diakses publik
- Laporan yang terjangkau dan secara rutin tersedia mengenai penggunaan dana